

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu keharusan dalam sebuah Negara, karena dengan melakukan pembangunan yang baik maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Negara tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Peet dan Hartwick (2009), pembangunan adalah suatu upaya untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuk setiap orang.¹ Sehingga tidak heran jika banyak Negara-negara di dunia yang ingin melakukan pembangunan diberbagai macam sisi kehidupan, baik dibidang politik, ekonomi, dan juga sosial budayanya.

Banyak Negara-negara maju yang kemudian melakukan percepatan-percepatan pembangunan dalam negaranya melalui modernisasi diberbagai bidang aspek kehidupan. Mereka melakukan perubahan-perubahan baik dibidang politik, ekonomi dan juga sosial budaya, yang berkombinasi dengan pembentukan ketersalinghubungan regional dan global yang unik, yang kemudian kita kenal juga sebagai era globalisasi.

Disisi lain, banyak negara-negara berkembang akhirnya juga berkaca pada Negara-negara maju di Eropa dan juga Amerika dalam melakukan pembangunan di negaranya, dengan tujuan untuk mencapai kemajuan-kemajuan yang sama seperti di Negara-negara maju tersebut. Hal ini dikarenakan oleh pencapaian

¹Yanuardi, *Diktat Teori Pembangunan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara*, Jurusan Pendidikan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, atau lihat di <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Yanuardi,%20S.IP.,%20M.Si./DEFINISI%20REFORMASI%20ADMINISTRASI%20NEGARA.pdf> , diakses pada tanggal 21/4/2014, jam 02.42 wib

pembangunan di Negara-negara Eropa dan Amerika tersebut dipandang sebagai sebuah model peradaban yang ideal dan mapan sehingga bisa menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Sehingga wajar jika banyak Negara berkembang tersebut juga mengejar modernitas sebagaimana yang berhasil dilakukan oleh Negara-negara maju.

Dalam melakukan perubahan dan pembangunan di negaranya, setiap Negara memiliki perbedaan kecepatan dalam melakukan pembangunan di negaranya. Hal ini dikarenakan perubahan dan pembangunan yang akan dilakukan tersebut haruslah berangkat dari pemahaman, strategi dan konsep-konsep yang handal dalam mentransformasi organisasi dan masyarakat di suatu Negara, dan juga melibatkan suatu transformasi baik struktural maupun kultural yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakatnya.

Sebagai salah satu contoh negara berkembang yang ingin melakukan pembangunan dan modernisasi ialah negara Republik Turki yang didirikan oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1923. Di era kepemimpinannya, Mustafa Kemal Attaturk aktif mengusung ide-ide modernitas di Turki dalam upayanya untuk membawa kemajuan bagi masyarakat Turki. Keadaan Turki yang terus mengalami kemerosotan pasca jatuhnya imperum besar islam (kerajaan Utsmani), membuat Attaturk berkeinginan untuk membangkitkan dan memajukan peradaban Turki seperti di negara-negara maju di Eropa dan Barat. Beliau bahkan dijuluki sebagai “Bapak Turki Modern” oleh sebagian masyarakat Turki.²

²www.kompas.com, *PM Erdogan dicaci maki*, diakses tanggal 21 agustus 2014 jam 12.00 wib

Namun dalam rangka melakukan pembangunan dan modernisasi di Negara Turki tersebut, Attaturk terlalu berorientasi pada model pembangunan negara-negara modern di Eropa dan Barat, sehingga membuat modernitas yang dijalankan oleh Attaturk sangatlah bias barat. Sebagaimana Harun Nasution menyimpulkan bahwa *westernisasi*, *sekularisasi*, dan *nasionalisme*, merupakan dasar pemikiran pembaharuan bagi Mustafa Kemal dalam membangun Turki.³

Attaturk beserta pemimpin-pemimpin Kemalis Turki selanjutnya dalam menirukan sistem sekularisasi yang diterapkan oleh negara-negara maju tersebut justru terkesan terlalu dipaksakan, sebagai akibat dari tujuan modernitas yang ingin dicapai di Turki. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat Turki kemudian dirubah oleh Attaturk, salah satunya yakni menghapuskan sistem pemerintahan kekhalifahan yang telah diterapkan sejak masa Turki Utsmani.⁴ Sementara dalam bidang sosial budaya, Attaturk membuat larangan dalam penggunaan simbol-simbol agama untuk ditampilkan dimuka umum, serta mengganti tulisan arab dengan tulisan latin. Bahkan tata cara berpakaian masyarakat Turki juga disarankannya untuk meniru gaya berpakaian masyarakat Eropa dan Barat yang menggunakan jas dan topi.⁵

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya tersebut, Attaturk dan Kemalis juga menggunakan kekuatan militer untuk mendukung dan membantunya

³ Qosim Nursheha Dzulhadi, *Antara Harun Nasution, Attaturk dan Sekularisme*, edisi Jum'at, 24 Zulqaidah 1435 H/8 Februari 2013, 20:53 Wib. Atau diakses di <http://www.voa-islam.com/read/hidayatullah/2013/02/08/23143/antara-harun-nasution-attaturk-dan-sekularisme/#sthash.fJickYbxy.dpbs>, pada tanggal 19/9/2014 jam 21.56 Wib.

⁴ M. Sya'roni Rofi, Skripsi Ilmu Hubungan Internasional: *Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

⁵ Randi Satria, Skripsi Ilmu Hubungan Internasional: *Upaya Turki Menginternasionalisasi Isu Muslim Di Xinjiang Cina Tahun 2009*, hlm 25-26, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

dalam mempertahankan nilai-nilai sekuler di Turki. Sehingga menjadikan kekuatan militer begitu dominan dalam pengambilan dan pelaksanaan setiap kebijakan di Turki.⁶

Hal-hal tersebut di atas, menjadikan cita-cita Attaturk untuk membuat Turki sebagai Negara yang modern dengan menjalankan sistem pemerintahan yang sekuler, justru membuat banyak masyarakat Turki yang merasa tertekan dengan keadaan tersebut. Sebagian besar masyarakat Turki yang mayoritasnya merupakan umat Islam justru merasa tidak puas terhadap pemerintahan yang ada, karena merasa kebebasan mereka dalam beragama dan berekspresi telah direnggut.

Namun pada tahun 2003 sejak terpilihnya Recep Tayyip Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki, sekulerisasi tersebut perlahan-lahan mulai diminimalisasi dan diganti dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan moderat. Dibawah kekuasaanya, Turki yang awalnya lebih dekat dengan negara-negara liberal Barat dan memiliki hubungan yang buruk dengan negara-negara Islam justru kini berbalik menjadi negara yang sangat terbuka dengan negara-negara Islam tersebut seperti Palestina dan Iran. Disisi lain, Erdogan juga berhasil mengembalikan hak kaum muslimah Turki untuk kembali menggunakan jilbab mereka, dan juga sukses membuat undang-undang baru yang mampu meredam atau membatasi campur tangan kekuatan militer dalam sistem perpolitikan di pemerintahan Turki.

⁶Ahlul Amalsyah, *Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) vs Kemalis; Strategi AKP Mengubah Arah Kebijakan Politik di Turki*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.

Selain itu, Turki kini merupakan salah satu Negara yang dalam beberapa periodenya melakukan percepatan-percepatan pembangunan di berbagai sisi kehidupan. Karena dalam beberapa periode terakhir Turki terus memfokuskan perubahan-perubahan dalam pembangunan negaranya, yang bertujuan untuk memodernisasi Turki. Terbukti sejak terpilihnya Recep Tayyip Erdogan bersama partai keadilan dan pembangunan (AKP)-nya, pertumbuhan ekonomi Turki terus meningkat.⁷ Dimana pembangunan ekonomi merupakan dampak dari terbangunnya kehidupan sosial budaya, politik dan hukum yang baik di Turki.

Banyak pembangunan dan kemajuan yang berhasil diraih Turki di era kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan tersebut, meskipun tidak dijalankan dengan cara-cara sekuler seperti yang terjadi dimasa kepemimpinan Ataturk dan juga Kemalıs lainnya. Mengapa Erdogan merubah kebijakan modernisasi Turki dan bagaimana sesungguhnya proses modernisasi yang dilakukan Turki dibawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan tersebut sehingga tumbuh menjadi kekuatan baru di kawasan Eropa dan geopolitik dunia?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada karya ilmiah ini adalah sebagai berikut,

yaitu :

- a. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari hipotesa yang telah disusun oleh penulis.

⁷Azyumardi Azra, *Erdogan Mau ke Mana?*, Release on Wednesday, 26 March 2014, 19:26 WIB _ Republika Online.htm. Diakses pada 17/6/2014 jam 8.42 wib.

- b. Penulisan ini juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana kebijakan Recep Tayyip Erdogan dalam memodernisasi Turki sejak tahun 2003-2014.
- c. Penulisan ini juga bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian mengenai Turki dalam pemerintahan Recep Tayyip Erdogan sebelumnya yang banyak mengupas mengenai islamisasi di Turki.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis ingin menemukan jawaban dari pertanyaan berikut ini:

Mengapa Recep Tayyip Erdogan mengubah kebijakan modernisasi Turki Ala Kemalis yang terlalu western bias ke arah yang lebih moderat sejak tahun 2003-2014?

D. Kerangka Teori

Teori adalah sarana pokok yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti dan yang telah diperoleh dengan landasan pemikiran yang digunakan sebagai dasar pijakan. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan yang di atas, maka penulis menggunakan tinjauan teori sebagai berikut:

1. Teori modernisasi

Teori modernisasi politik klasik milik Almond dan Coleman memandang bahwa sistem politik di negara dunia ketiga terbelakang dan terikat oleh tradisi. Sehingga menurut teori ini, semua tradisi pada akhirnya harus dihancurkan dan digantikan dengan struktur dan institusi modern ala barat seperti model institusi modern birokrasi, badan pemilihan umum, partai politik, kelompok kepentingan dan lain sebagainya.⁸

Hal tersebut sejalan dengan Wilbert E. Moore yang mendefinisikan modernisasi sebagai suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra-modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial kearah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri Negara barat yang stabil.⁹

Namun teori di atas dapat disanggah dengan kehadiran pemikiran dari Michael R. Dove (1988) sebagai salah seorang pendukung teori modernisasi yang mengatakan bahwa tradisional tidak harus berarti keterbelakangan, budaya tradisional itu sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial, dan politik dari masyarakat pada tempat mana budaya tradisional itu melekat, dengan demikian budaya tradisional tidak mengganggu proses pembangunan.¹⁰

Menurut P. Samuel Huntington, modernisasi adalah sebuah produk ekspansi dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimulai pada abad ke 18 yang

⁸Alma Karimah dan Rahardhika Arista, *Teori Pembangunan Negara "Sosiologi Perubahan Ekonomi"*, edisi 22 April 2011. Sebuah artikel tentang ulasan *Society, State and Market* karya Martinussen yang membahas isu seputar politik di negara-negara dunia ketiga. Diakses pada tanggal 19/9/2014, jam 22.03 wib.

⁹<http://www.slideshare.net/UlulAzmiLomuberRezqi/modernisasi-sebagai-dampak-perubahan-sosial-26495699?related=1>)

¹⁰J. R. Mansoben, *Kebudayaan dan Pembangunan Dalam Kerangka Otonomi Khusus*, yang disampaikan pada Simposium Nasional Papua: "*Menuju Pembangunan Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan*;" Kerjasama FISIP Universitas Indonesia, Jakarta dan FISIP Universitas Cenderawasih, Jayapura, di Jakarta pada tanggal 7 – 9 April 2010. Diakses pada tanggal 20/4/2014, jam 03.26 wib.

memungkinkan manusia untuk mengontrol dan membentuk lingkungan mereka secara total. Modernisasi mempengaruhi industrialisasi, urbanisasi, peningkatan level literature, pendidikan, kekayaan, mobilisasi sosial, dan pekerjaan yang lebih luas serta beragam, sehingga modernisasi bukanlah westernisasi.¹¹ Samuel menyebutkan bahwa pemikiran yang mengasumsikan bahwa masyarakat modern adalah masyarakat Barat dan atau sebaliknya, sepenuhnya merupakan identifikasi yang salah. “...*that modern civilization is Western civilization and that Western civilization is modern civilization. This, however, is a totally false identification*”.¹²

Definisi lain mengenai modernisasi juga dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**, yang mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan dalam suatu perencanaan, yang biasanya dinamakan *social planning*. Dimana syarat-syarat untuk melakukan modernisasi menurutnya, yaitu:¹³

1. Cara berpikir yang ilmiah yang berlembaga dalam kelas penguasa ataupun masyarakat.
2. Sistem administrasi negara yang baik, dan benar-benar dapat mewujudkan birokrasi.
3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu.
4. Penciptaan iklim yang menyenangkan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa.

¹¹Ibid. hlm. 69

¹²Ibid. hlm. 69

¹³https://www.academia.edu/3784423/Syarat_Modernisasi_sunting_Soerjono_Soekanto_mengemukakan_bahwa_sebuah_modernisasi_memiliki_syarat_syarat_tertentu_yaitu_sebagai_berikut_Perdebatan_Teori_Modernisasi_Dan_Teori_Ketergantungan, diakses pada tanggal 19/9/2014, jam 21.50 wib.

5. Tingkat organisasi yang tinggi yang di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan.
6. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial.

Selain itu, **Piotr Sztompka** juga menuliskan tiga pengertian dari konsep modernisasi, yaitu *historis*, *relative* dan juga *analisis*. Namun pada penelitian ini penulis hanya menggunakan dua konsep dari tiga konsep Piotr Sztompka mengenai modernisasi di atas tersebut, yakni konsep modernisasi relatif dan juga analisis.

Dalam pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamakan standar yang dianggap modern baik oleh rakyat banyak maupun oleh elite penguasa. Sehingga standarnya berbeda-beda. Sementara dalam konsep analisis, modernisasi meliputi kemampuan yang makin besar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masa mendatang; luasnya bidang perhatian dan berkembangnya potensi empati terhadap situasi dan terhadap orang lain; berkembangnya apresiasi kemajuan diri, mobilitas; dan meningkatnya penekanan perhatian pada masa kini sebagai dimensi waktu yang bermakna dari kehidupan manusia.¹⁴

Defenisi-defenisi di atas menunjukkan adanya perbedaan pendapat dari masing-masing ahli dalam mengartikan makna modernisasi. Pengertian modernisasi historis atau modernisasi klasik mengidentikkan pembangunan yang bermodelkan barat, sehingga untuk melakukan modernisasi tersebut setiap Negara haruslah merubah setiap aspek-aspek kehidupan negaranya ke arah pembangunan

¹⁴ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Perdana Media Group, Edisi Pertama, Cetakan ke-6, 2011).

sebagaimana yang ada di negara-negara barat. Sementara seiring perkembangan zaman, beberapa ahli sosiologi seperti Piotr Sztompka dan Soerjono Soekanto mendefenisikan atau memaknai modernisasi hanya sebatas upaya-upaya pencapaian kemajuan pembangunan di suatu negara tanpa harus selalu berorientasi pada pembangunan yang ada di negara-negara barat tersebut.

Dari beberapa pengertian tentang modernisasi di atas, maka penulis mengelompokkan modernisasi kedalam dua bentuk, yakni modernisasi yang mengacu dan meniru pada kehidupan barat, dan juga modernisasi yang tidak mengharuskan untuk mengikuti gaya kehidupan dan pembangunan di barat.

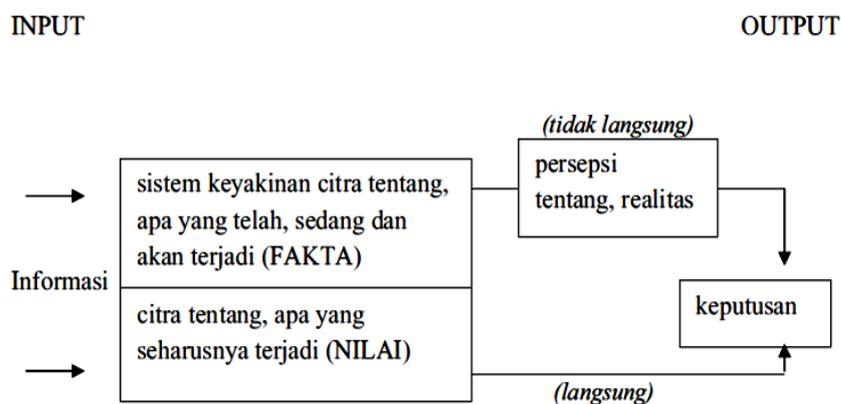
Modernisasi yang dijalankan oleh Mustafa Kemal Attaturk dan juga Kemalis lebih condong kepada model modernisasi pertama yang dengan keseluruhan menirukan pembangunan dan kehidupan gaya barat untuk memodernkan Turki. Sementara Recep Tayyip Erdogan dalam melakukan modernisasi di Turki tidak serta merta melanjutkan model pembangunan seperti yang dilakukan oleh Attaturk dan Kemalis sebelumnya, tetapi dengan cara-cara yang lebih moderat. Secara umum teori modernisasi di atas akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai mengapa Erdogan mengubah arah kebijakan modernisasi di Turki ala Kemalis tersebut.

3. Teori Persepsi

Setiap manusia mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dalam menilai suatu objek, sehingga seringkali menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi. Ini menunjukkan adanya

perspektif yang berbeda-beda pula dari masing-masing individu dalam memandang suatu hal atau suatu permasalahan.

Teori persepsi yang dikemukakan oleh Ole R. Holsti yang mengasumsikan bahwa perilaku suatu Negara tergantung pada cara pandang Negara itu terhadap suatu objek atau situasi. Persepsi ini selain mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang dalam mengartikan situasi yang dihadapinya, apakah situasi itu baik atau buruk, merupakan ancaman atau bukan, juga mengandung keyakinan tentang suatu hal yang dianggap benar, meskipun kebenaran tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁵ Untuk lebih jelasnya, Holsti telah membuat diagram bagaimana nilai dan keyakinan dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam mengambil keputusan seperti berikut ini.¹⁶



Dari diagram di atas, bisa kita lihat bahwa sistem keyakinan citra tentang apa yang telah, sedang, dan akan terjadi atau disebut juga sebagai fakta secara tidak langsung akan mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat suatu keputusan. Namun demikian, persepsi tersebut tidak bisa lepas dari nilai-nilai

¹⁵ Ole R.Holsti, *International Politik A frame Work For Analysis* (Edisi ke-3, Pretice Hall, Mc Engel Wood Cliffs), News Jersey, 1997. Hlm.367-370.

¹⁶ Muchtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisa*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM, 1989. Hlm. 21

yang dipahami oleh seorang individu tentang apa yang seharusnya ada atau terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Karena fakta dan nilai yang dipahami oleh seseorang bersifat dinamis, maka persepsi seseorang dalam melihat suatu objek juga bisa berubah-ubah yang berujung pada perbedaan sikap atau tindakan keputusan.

Terkait perubahan kebijakan modernisasi yang dijalankan oleh Recep Tayyip Erdogan di Turki tentunya tidak bisa terlepas dari adanya perbedaan perspektif yang dimiliki antara Erdogan dengan Mustafa Kemal Attaturk dan juga Kemal. Ini menandakan adanya perbedaan nilai-nilai tentang modernisasi yang dipahami oleh masing-masing aktor pemimpin tersebut.

4. Konsep Pemikiran Arsitek Modernisme Islam (Muhammad Abduh)

Salah satu faktor dalam teori persepsi di atas yakni tentang pengetahuan yang haruslah menggunakan akal logika dalam berpikir untuk mengetahui apa yang terjadi. Ini sesuai dengan pemikiran M. Abduh yang sangat menjunjung tinggi akal dalam kehidupan manusia.

Abduh berpendapat bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist mengenai hidup kemasyarakatan diungkapkan dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang tidak terperinci dan dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman. Ia percaya bahwa kekuatan akal merupakan dasar peradaban suatu bangsa, karena pemikiran akal menimbulkan ilmu pengetahuan. Menurutnya zaman keemasan Islam pada masa lampau ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga Islam pastilah sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan kini bangsa barat

mengalami kemajuan karena ilmu pengetahuan yang sedang berkembang disana. Untuk bisa meraih kembali kejayaannya, umat islam harus bisa menguasai ilmu pengetahuan. Menurutnya islam memandang akal memiliki kedudukan yang tinggi sehingga islam itu adalah agama yang rasional. Wahyu tidak membawa hal-hal yang bertentangan dengan akal, dan menggunakan akal adalah salah satu dari dasar-dasar islam.¹⁷

Pemikirannya dalam kehidupan bernegara, memandang bahwa islam hanya mengenal satu kekuasaan, yaitu kekuasaan politik yang berhubungan dengan urusan keduniaan yang tidak berlandaskan agama.¹⁸ Namun dengan kekuasaan politik Abduh menghendaki agar prinsip-prinsip ajaran islam dapat dijalankan oleh yang mempunyai hak dan wewenang pemerintah, namun tidak memberi peluang munculnya sistem teokrasi. Karena usaha pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip islam harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Undang-undang yang dibuat juga harus memiliki hubungan erat dengan kondisi Negara setempat, sehingga undang-undang tersebut tidak boleh didasarkan pada prinsip-prinsip budaya dan politik Negara lain.

Menurut pemikiran Abduh, pemerintahan itu tidak berlandaskan agama, tetapi memiliki tugas-tugas keagamaan untuk memelihara nilai-nilai dan prinsip-prinsip islam yang umum. Ia tidak menghendaki pemerintah eksklusif untuk umat islam, dan menerima Negara kesatuan nasional yang berkembang di zaman modern. Kekuasaan politik baginya selain untuk mengurus dunia juga harus melaksanakan prinsip-prinsip islam.

¹⁷Didin Saefuddin, Biografi Intelektual 17 Tokoh, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islami*, PT. Grasindo, Jakarta, 2003.

¹⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, hlm. 282

Konsep pemikiran Muhammad Abduh di atas memiliki kesamaan dengan pemikiran Erdogan mengenai peran serta agama dalam perpolitikan di sebuah Negara. Sehingga konsep pemikiran Muhammad Abduh secara umum nantinya akan dapat membantu penulis dalam menganalisa pokok-pokok pembahasan mengenai dua pertanyaan rumusan masalah diatas berkenaan dengan Mengapa Recep Tayyip Erdogan mengubah kebijakan modernisasi ala kemalis, dan bagaimanakah upaya-upaya yang dijalankan oleh Recep Tayyip Erdogan dalam memodernisasi Turki sejak tahun 2003-2014.

E. Hipotesa

Dari latar belakang dan kerangka teori yang penulis jelaskan di atas, maka hipotesa yang dapat diambil penulis yakni :

Recep Tayyip Erdogan mengubah kebijakan modernisasi Turki ala Kemalists yang terlalu western bias ke arah kebijakan modernisasi yang lebih moderat disebabkan karenaterdapat perbedaan perspektif antara Recep Tayyip Erdogan dengan Mustafa Kemal Attaturk maupun pemimpin Kemalists lainnya dalam memaknai modernisasi. Sehingga menyebabkan terjadinya model-model atau bentuk-bentuk modernisasi yang saling bertentangan diantara mereka. Modernisasi Attaturk dan Kemalists yang sangat bias barat dipandang Erdogan sebagai sesuatu yang tidak kontekstual dengan kekinian Turki, karena mengaburkan identitas Turki dan menjauhkan Turki dari kemajuan yang dicita-citakan. Sehingga untuk mengembalikan tujuan modernisasi tersebut, Erdogan

memilih untuk menggunakan cara-cara yang berbeda dengan yang dijalankan oleh Attaturk dan Kemalis sebelumnya.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi kajian pada persoalan alasan Recep Tayyip Erdogan merubah bentuk-bentuk kebijakan modernisasi yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya hingga akhirnya Erdogan berhasil menjadi PM Turki yakni mulai tahun 2003-2014. Jadi batas penelitian yang dilakukan peneliti hanya sebatas analisis pada penyebab Erdogan merubah bentuk modernisasi di Turki tersebut di atas.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Jenis Data.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat *kualitatif* (deskriptif), yang bertujuan untuk membuat diskripsi, penjelasan atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki. Sementara itu, data yang dibutuhkan

dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk yang tidak langsung, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, hasil diskusi ilmiah, laporan media, artikel-artikel resmi pemerintah dan laporan lembaga-lembaga internasional mengenai permasalahan yang sedang diteliti.¹⁹

¹⁹ Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Bentang Budaya, 1996, Hal: 47

H. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan atau menceritakan tentang profil dan sejarah Negara Turki mulai dari era Utsmani, Mustafa Kemal Attaturk sampai dengan era kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan.

Bab 3 Pada bab ini penulis akan membahas permasalahan mengapa Recep Tayyip Erdogan mengganti kebijakan Turki modern yang sudah ada di jaman Mustafa Kemal Attaturk sebelumnya.

Bab 4 Penulis akan menganalisa bagaimana Recep Tayyip Erdogan membuat Turki menjadi Negara modern dan islami.

Bab 5 Sebagai bab terakhir dalam penelitian ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari pembahasan bab-bab sebelumnya.